



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BKPSDM)
KABUPATEN TANAH LAUT**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Kami dapat menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Akhir Tahun Anggaran 2020 sebagai bahan masukan penyusunan LKPj Bupati Kabupaten Tanah Laut yang akan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Tanah Laut.

LKPj ini secara garis besar menggambarkan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut dengan sarana dan prasarana serta personil yang dimiliki mencakup realisasi belanja, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas beserta permasalahan dan solusinya pada Tahun Anggaran 2020. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut telah menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian dengan tujuan memenuhi target Kinerja yang termuat dalam Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2020 dan Rencana Strategis (RENSTRA) 2018 – 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan sistem Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini secara sistematis disesuaikan dan mengacu kepada Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 130/183/PEM/2021 Tentang permintaan Data bahan Penyusunan LKPj Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020, Dokumen LKPj yang disusun ini berdasarkan hasil kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun anggaran 2020.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Akhir Tahun Anggaran 2020 kami susun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pihak pihak yang berkepentingan serta menjadi bahan sarana evaluasi bagi kami segenap jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pelaihari, Januari 2021
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut,

H. HAIRUL RIJAL, S.Sos, M.Si
NIP. 19700217 199009 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
B. Gambaran Umum SKPD.....	1
C. Sumber Daya Manusia.....	9
D. Produk dan layanan	12
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)	14
A. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023	14
B. Strategi dan Arah Kebijakan.....	17
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	19
A. Urusan Pemerintahan Fungsi penunjang	19
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sebagai Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan	19
2. Program dan Kegiatan	19
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	20
4. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	43
5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan (Kesesuaian antara Renstra dan Renja)	46
7. Kondisi Sarana dan Prasarana BKPSDM	49
8. Permasalahan dan Solusi	49
B. Indikator Kinerja Kunci	51
BAB IV REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020 ..	52
BAB V TUGAS PEMBANTUAN.....	55
A. Tugas Pembantuan yang diterima	55
B. Tugas Pembantuan yang di Berikan	55
BAB VI TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	56
A. Kerjasama dengan Mitra Kerja.....	56
BAB VII PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDART PELAYANAN MINIMAL (SPM)	62
BAB VIII AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	65
A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja BKPSDM Kabupaten Tanah Laut	65
B. Capaian Target Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja	66
C. Perbandingan Capaian Kinerja 2019 terhadap capaian 2018	67

D. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan Target dalam RPJMD Tahun 2018 – 2023.....	68
E. Analisis efisiensi dalam Pencapaian Kinerja	69
F. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target dan Kinerja	69
BAB IX PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 16

Tabel 3. 1 Program Dan Kegiatan BKPSDM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 19

Tabel 3. 2 Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan PNS
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 20

Tabel 3. 3 Rekapitulasi Per Jenis Kelamin PNS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 21

Tabel 3. 4 Rekapitulasi PNS Kabupaten Tanah Laut Per Golongan Tahun 2020 24

Tabel 3. 5 Rekapitulasi PNS Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Pendidikan Formal Tahun
2020 29

Tabel 3. 6 Rekapitulasi PNS Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Tingkat Perjenjangan Tahun
2020 32

Tabel 3. 7 Rekapitulasi PNS Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Jabatan/Eselonering
Tahun 2020 35

Tabel 3. 8 Rekapitulasi PNS Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Batas Usia Pensiun Tahun
2020 39

Tabel 3. 9 Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Tahun 2020 43

Tabel 3. 10 Ringkasan dan Realisasi APBD SKPD Berdasarkan Program Tahun 2020 44

Tabel 3. 11 Indikator Kinerja Kunci BKPSDM..... 51

Tabel 4. 1 Target dan Capaian Kinerja BKPSDM Tahun 2020 52

Tabel 7. 1 Pencapaian Pelayanan Sesuai dengan Tugas dan Fungsi 63

Tabel 8. 1 Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 65

Tabel 8. 2 Capaian Target dan Kinerja Tahun 2020..... 66

Tabel 8. 3 Perbandingan Capaian Kinerja 67

Tabel 8. 4 Perbandingan Capaian Kinerja terhadap RPJMD 2018-2023 68

Tabel 8. 5 Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target dan Kinerja Tahun 2020. 69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut sebagai lembaga teknis dari Perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati untuk merumuskan kebijakan teknis di Bidang Kepegawaian yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.

LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah untuk itu Kemedagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing masing urusan, IKK merupakan Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan Penyelenggaraan Suatu Urusan Pemerintahan.

Tuntutan Penyelenggaraan Pemerintah daerah yang lebih transparan, Partisipatif dan akuntabilitas yang menjadi hal penting sebagai basis Kinerja pemerintah daerah yang berdasar Hukum:

1. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kepala Daerah setelah tahun Anggaran berakhir;
2. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 Tentang LPPD, LKPD Kepala Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

B. Gambaran Umum SKPD

a. Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai **Tugas Pokok** sebagai berikut:

membantu Bupati Tanah Laut dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah

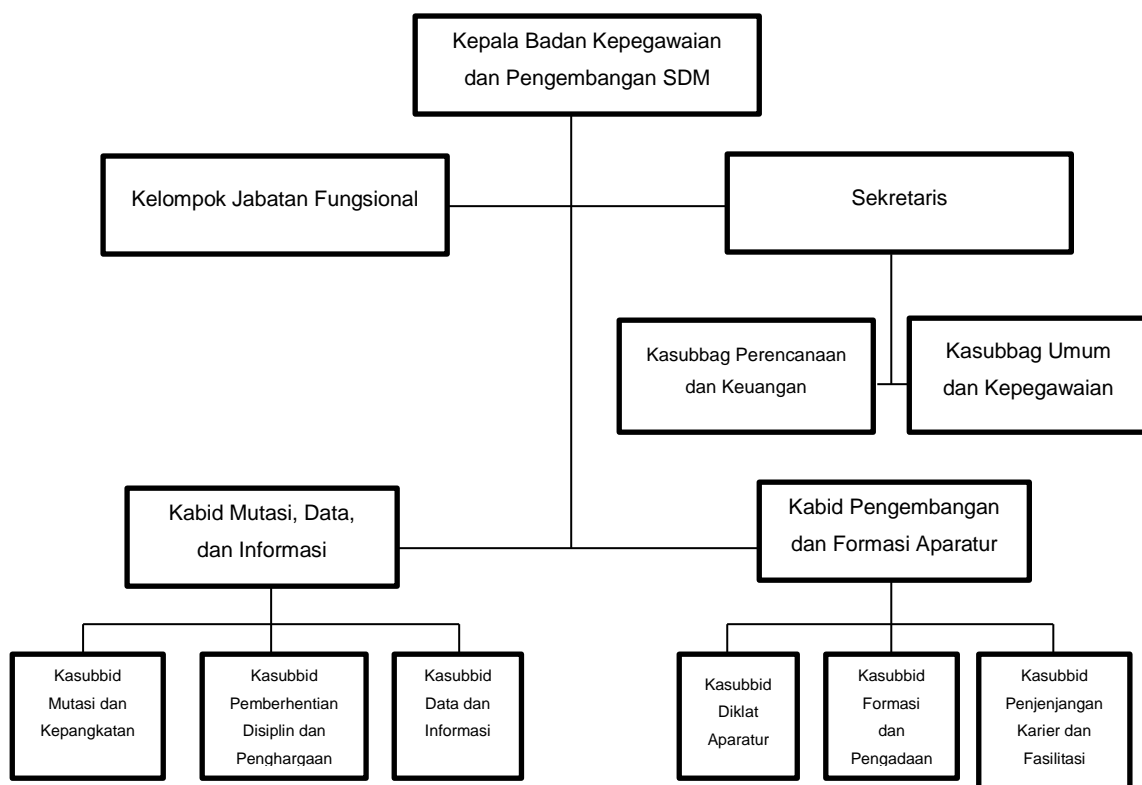
Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. Perumusan kebijakan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- f. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut

Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 86 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:



Dari bagan struktur organisasi diatas sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut adalah terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris membawahi:
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur, membawahi:
 - Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengadaan.
 - Kepala Sub Bidang Penjenjangan Karier dan Fasilitasi Profesi Aparatur.
 - Kepala Sub Bidang Diklat Aparatur
4. Kepala Bidang Mutasi, Data, dan Informasi, membawahi:
 - Kepala Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan.
 - Kepala Sub Bidang Pemberhentian, Disiplin, dan Penghargaan Aparatur.
 - Kepala Sub Bidang Data dan Informasi.

1. Tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas membantu Bupati Tanah Laut dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi, yaitu ;

- a. Penyusunan rencana kerja bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. Perumusan kebijakan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- f. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan urusan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, administrasi dan kebutuhan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perencanaan program, pengumpulan data dan penyusunan laporan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Badan;
- b. Pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia;

- c. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. Penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
- g. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- i. Pengkoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- k. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan.
- 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

2. Tugas dan fungsi Bidang Mutasi, Data, dan Informasi

Bidang Mutasi, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan mutasi dan promosi, kepangkatan, disiplin dan penghargaan aparatur, penyiapan data dan informasi.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Mutasi, Data, dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang mutasi, data dan informasi;
- b. Perumusan kebijakan mutasi dan promosi;
- c. Penyelenggaraan proses mutasi dan promosi;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan mutasi dan promosi;
- e. Memverifikasi dokumen mutasi dan promosi;
- f. Pemverifikasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi dan promosi;
- g. Perumusan kebijakan penilaian kinerja dan penghargaan;
- h. Perencanaan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja dan penghargaan;
- i. Pengkoordinasian kegiatan penilaian kinerja;
- j. Mengevaluasi hasil penilaian kinerja;
- k. Memverifikasi usulan pemberian penghargaan;
- l. Evaluasi dan pelaporan penilaian kinerja dan penghargaan;
- m. Penyiapan dan penyajian data dan informasi;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Kepala Bidang Mutasi, Data, dan Informasi membawahi 3 (tiga) Sub Bidang dengan tugas sebagai berikut:

1. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan

Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan mutasi dan kepangkatan.

-
2. Sub Bidang Pemberhentian, Disiplin dan Penghargaan Aparatur
Sub Bidang Pemberhentian, Disiplin dan Penghargaan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kebijakan pemberhentian, disiplin dan penghargaan aparatur.
 3. Sub Bidang Data dan Informasi
Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, penyajian dan penyimpanan data dan informasi.

3. Tugas dan fungsi Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur

Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan diklat aparatur, formasi dan pengadaan, penjenjangan karier dan fasilitas profesi aparatur.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang pengembangan dan formasi aparatur;
- b. Perumuskan kebijakan pengembangan diklat aparatur;
- c. Penyelenggaraan pengembangan diklat aparatur;
- d. Pengkoordinasian dan kerjasama pelaksanaan formasi dan pengadaan;
- e. Perencanaan kebutuhan diklat dan non diklat;
- f. Fasilitasi pelaksanaan profesi aparatur;
- g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi;
- h. Perumusan kebijakan formasi dan pengadaan;
- i. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan;
- j. Penyelenggaraan pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- k. Pengkoordinasian pelaksanaan administrasi pemberhentian;
- l. Memverifikasi dokumen administrasi;

-
- m. Pengkoordinasian penyusunan informasi kepegawaian;
 - n. Fasilitasi lembaga profesi Aparatur Sipil Negara;
 - o. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi;
 - p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - q. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur membawahi 3 (tiga) Sub Bidang dengan tugas sebagai berikut:

1. Sub Bidang Diklat Aparatur
Sub Bidang Diklat Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kebijakan diklat aparatur.
2. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan
Sub Bidang Formasi dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kebijakan formasi dan pengadaan.
3. Sub Bidang Penjenjangan Karier dan Fasilitasi Profesi Aparatur
Sub Bidang Penjenjangan Karier dan Fasilitasi Profesi Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait penjenjangan karier dan fasilitasi profesi aparatur.

5. Tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- e. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- g. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Sumber Daya Manusia

1. Sumber Daya Manusia/Aparatur

Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan jumlah pegawai sebanyak 47 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 33 orang dan Non PNS sebanyak 14 orang yang terdiri dari:

- Golongan IV sebanyak : 2 orang
- Golongan III sebanyak : 18 orang
- Golongan II sebanyak : 13 orang
- Golongan I sebanyak : 0 orang
- Non PNS/PTT : 14 orang

Jenjang pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut, terdiri dari:

- Pendidikan S.2 : 2 orang
- Pendidikan S.1 : 14 orang
- Pendidikan D. III : 11 orang
- Pendidikan SLTA : 6 orang
- Pendidikan SLTP : 0 orang
- Pendidikan SD : 0 orang

PNS Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional dan Staf :

- Eselon II b : 1 orang
- Eselon III a : 1 orang
- Eselon III b : 2 orang
- Eselon IV a : 8 orang
- Widyaiswara Ahli Pertama : 0 orang
- Analis Kepegawaian Pertama : 1 orang
- Arsiparis Pertama : 1 orang

- Pranata Komputer Pertama : 1 orang
- Pranata Komputer Lanjutan : 1 orang
- Staf : 18 orang

2. Aset/Modal

Aset/modal pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut, yakni:

No	Uraian	Jumlah
1.	Tanah	17982 m2
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6481 m2
	- Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1150
	- (Pengembangan Sumber Daya Manusia)	1 m2
2.	Alat - Alat Angkutan	10 unit
	- Jeep	1 unit
	- Mini Bus (Penumpang 14 org ke bawah)	2 unit
	- Sepeda Motor	7 unit
3.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	491
	- Mesin Ketik Manual Portable (11 - 13)	2 buah
	- Mesin Ketik Manual Longewagon (18)	1 buah
	- Mesin Fotocopy dengan Kertas Double Folio	2 buah
	- Lemari Besi	40 buah
	- Rak Besi / Metal	7 buah
	- Brand Kas	2 buah
	- Lemari Kaca	1 buah
	- Lemari Kayu	24 buah
	- Kotak Penyimpanan Bendera	1 buah
	- Mesin Absensi	10 buah
	- Overhead Projector	1 buah
	- Genset	3 buah
	- Mesin Pompa Air	2 buah
	- Meja Kayu / Rotan	29 buah
	- Meja Rapat	3 buah

	- Meja Podium	1	buah
	- Kursi Tamu	1	set
	- Kursi Putar	15	buah
	- Bangku Tunggu	4	set
	- Kursi Lipat	1	buah
	- Meja Komputer	1	set
	- Sofa	3	set
	- Lemari Pakaian	4	buah
	- Lemari Rias	1	buah
	- Tempat Tidur Busa (Springbed)	45	buah
	- Kursi Kerja	51	buah
	- Gordyn	1	set
	- Mesin Potong Rumput	1	unit
	- Mesin Cuci	3	buah
	- AC Unit	4	buah
	- AC Split	13	buah
	- Mainframe	1	buah
	- PC Unit / Komputer PC	23	set
	- Laptop	6	buah
	- Note Book	17	buah
	- Printer	3	buah
	CPU	1	buah
	- Monitor	6	buah
	- Printer	27	buah
	- Scanner	3	buah
	- Peralatan Personal Komputer Lain - Lain	3	buah
	- UPS	19	buah
	- Stabilizer / Stavolt	4	buah
	- Harddisk Internal	4	buah
	- Harddisk Eksternal	4	buah
	- Speaker Active Komputer	6	buah
	- Memory	2	buah
	- Server	3	buah
	- Peralatan Jaringan Lain - Lain	14	buah
	- Tiang Antene	2	buah
	- Radio Access Point	2	buah
	- Antene	1	buah

	<ul style="list-style-type: none"> - Switch Hub - Wireless Access Point - Meja Kerja - Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis - Mesin Exhaust Fan - Karpet Sajadah - Kulkas 	1 buah 1 buah 51 buah 2 buah 1 buah 6 buah 1 buah
4.	Alat Studio dan Alat Komunikasi <ul style="list-style-type: none"> - Projector + Attachment - Microphone / Wireless Mic - Handycam - Stand Microphone - Layar Projector - Televisi - Loudspeaker - Tripod Speaker - VCD / DVD Player - Mouse Pen - Camera Electronic - Micxer PVC - Faximile - Wireless Portable Sound - Sound System 	37 buah 4 buah 6 buah 2 buah 6 buah 2 buah 2 buah 1 buah 4 buah 1 buah 2 buah 3 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah
5.	Alat - Alat Persenjataan / Keamanan <ul style="list-style-type: none"> - CCTV 	2 set 2 set

D. Produk dan layanan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No. 86 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BKPSDM Kabupaten Tanah Laut. Dalam hal ini BKPSDM berkedudukan sebagai lembaga teknis di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tanah Laut yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Tanah Laut melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Melaksanakan tugas pokok tersebut, BKPSDM membantu Bupati dalam melaksanakan manajemen kepegawaian sesuai dengan misi BKPSDM Kabupaten Tanah Laut yaitu meningkatkan pelayanan di bidang administrasi kepegawaian secara tepat waktu dan tepat guna tanpa ada pungutan biaya dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, dengan jenis produk pelayanan antara lain:

1. Menyusun formasi tentang kebutuhan PNS di Kabupaten Tanah Laut
2. Pembuatan SK Kenaikan Gaji Berkala, SK Kepangkatan dan Penggajian, SK Mutasi, dan SK Pensiun
3. Data SIMPEG
4. Membuat Kartu Pegawai, TASPEN, dan TAPERUM
5. Pelaksanaan / penyertaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prajabatan
6. Pelaksanaan / penyertaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Struktural
7. Pelaksanaan / penyertaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Teknis / Fungsional
8. Pelaksanaan PNS Tugas Belajar, SK Ijin Belajar, dan Ikatan Dinas
9. Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNSD
10. Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN
11. Dan pelaksanaan pelayanan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi BKPSDM.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023

Dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Tanah Laut menjelaskan mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, strategi dan kebijakan yang terkait dengan tugas dan Fungsi dalam urusan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama 5 (lima) tahun dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023

VISI:

“Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut yang BerInTeRAkSi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi)”

- **Berkarya** bermakna merujuk pada hasil kerja, bahwa selama periode 2018 - 2023 para pelaku pembangunan di daerah kabupaten Tanah Laut secara bersama sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.
- **Inovasi** bermakna Inovasi adalah solusi logis terhadap tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan public yang berkualitas karena itu inovasi dalam penyelenggaraan public yang dilaksanakan seluruh perangkat daerah kabupaten Tanah Laut harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.
- **Tertata** bermakna tertib administrasi dan tertib substansi dalam sebuah siklus perencanaan yang semakin berkualitas dengan demikian kualitas perencanaan di perangkat daerah terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin di tingkatkan secara berkesinambungan.

-
- **Religius** Pada aspek religius ini, peran sector keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat, aparatur sipil ditiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.
 - **Aktual** Penekanan pada aspek actual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta Program dan Kegiatan perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi dan relevan dengan pihak yang dilayani yaitu masyarakat di daerah kabupaten Tanah Laut.
 - **Sinergi** dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong royongan dalam upaya peningkatan Kesejahteraan rakyat, upaya integritas, sinkronisasi dan sinergi ditingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung

Misi:

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi, rumusan Misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin di capai dan membantu menguraikan upaya upaya strategis yang harus dilakukan dalam rangka Mewujudkan “**Tanah Laut yang BERINTERAKSI**” maka Misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut periode 2018 – 2023 yakni:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya.
2. ***Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.***
3. ***Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).***
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut tersebut, maka sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut memiliki peran dalam pencapaian terhadap Misi 2 (kedua) dan Misi ke 3 (ketiga) dengan Tujuan dan Sasaran pada masing masing Misi yakni:

- 1. Misi ke-2 (dua) yakni**
: Menciptakan Inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif

Tujuan ke -2..2 yakni
: Peningkatan Inovasi dimasyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif

Indikator Sasaran
: Nilai IKM
- 2. Misi ke-3 (tiga) yakni**
: membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Tujuan ke-1 (satu) yakni
: meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi

Indikator Sasaran
: Indeks reformasi birokrasi

Tabel 2. 1

Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023

Visi	Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi)		
Misi ke 2	Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan inovasi di masyarakat dan pengembangan industri kreatif	Meningkatnya kontribusi industri kreatif dalam perekonomian	Pengembangan standart Pelayanan untuk penyebaran Informasi	Penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat
Misi ke 3	Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan tata kelola	Meningkatnya akuntabilitas	Peningkatan tata kelola	1. Memberikan kesempatan

pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) untuk meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi, termasuk di dalamnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	yang seluas luasnya kepada ASN untuk mengembangkan kompetensi dalam rangka Menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat 2. Berusaha Meningkatkan anggaran untuk kegiatan pengembangan Kompetensi baik yang dilaksanakan melalui kegiatan Klasikal maupun non Klasikal 3. Melakukan Evaluasi terhadap Kinerja dari masing masing PNS di Lingkungan BKPSDM
--	---	--	---

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Tanah Laut diatas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Menetapkan Sasaran Strategis dan Kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut yakni:

- **Sasaran Strategis:**
 1. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara
 2. Tersedia nya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi Standart Kompetensi
 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian

➤ **Arah Kebijakan:**

1. Penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat
2. Memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada ASN untuk mengembangkan kompetensi dalam rangka Menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat
3. Meningkatkan kegiatan pengembangan Kompetensi baik yang dilaksanakan melalui kegiatan Klasikal maupun non Klasikal
4. Melakukan Evaluasi terhadap Kinerja dari masing masing PNS di Lingkungan BKPSDM

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

A. Urusan Pemerintahan Fungsi penunjang

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sebagai Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan

Dalam Melaksanakan tugas pokok tersebut, BKPSDM membantu Bupati dalam melaksanakan manajemen kepegawaian sesuai dengan misi BKPSDM Kabupaten Tanah Laut yaitu meningkatkan pelayanan di bidang administrasi kepegawaian secara tepat waktu

2. Program dan Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 memuat 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan, yang mana Pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan BKPSDM Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Sekretariat dan bidang – bidang lainnya, yang mana arah program dan kegiatannya berpedoman kepada Renstra BKPSDM. Sedangkan tujuannya untuk dapat menjabarkan dari visi dan misi yang telah disepakati, seimbang dengan sarana yang ingin dicapai yakni peningkatan SDM / Aparatur dan pelayanan yang sebaik – baiknya, sehingga tercapai Pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab.

Tabel 3. 1

Program Dan Kegiatan BKPSDM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Program		Kegiatan	
1	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	I	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.	Pembinaan dan Pengembangan Kediklatan Aparatur
				2.	Pembinaan, Pengembangan formasi dan Pengadaan ASN
				3.	Pembinaan, Penjenjangan karier, dan Fasilitasi Profesi Aparatur
				4.	Kegiatan Assesment
2.	Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang	II	Mutasi, Data dan Informasi	5.	Pembinaan, Penanganan disiplin dan Penghargaan ASN

	memenuhi Standart Kompetensi			6.	Penyusunan Rencana Pembinaan dan Pengembangan karier ASN
				7.	Pembangunan, Pengembangan dan Pelayanan Sistem Informasi Kepegawaian
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian	III	Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.	Penyediaan rapat – rapat Konsultasi dan Koordinasi
				9.	Penyediaan Jasa,bahan, peralatan dan perlengkapan kantor
				10.	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD
		IV	Pemenuhan peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	11.	Rehabilitasi sedang/ berat Gedung Kantor
				12.	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya
		V	Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	13.	Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan
		VI	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	14.	Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD

3. Jumlah Pegawai,Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Tabel 3. 2
 Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan
 PNS Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020

Golongan/ Ruang	Eselon				Non Eselon		Jumlah
	I	II	III	IV	JFU	JFT	
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/d	0	2	0	0	0	0	2
Golongan IV/c	0	21	0	0	3	1	25
Golongan IV/b	0	6	35	5	213	5	264
Golongan IV/a	0	0	66	32	745	18	861
Jumlah Golongan IV	0	29	101	37	961	24	1152
Golongan III/d	0	0	47	245	458	24	774
Golongan III/c	0	0	4	128	564	30	726
Golongan III/b	0	0	0	50	844	110	1004

Golongan III/a	0	0	0	24	357	140	521
Jumlah Golongan III	0	0	51	447	2223	304	3025
Golongan II/d	0	0	0	0	104	182	286
Golongan II/c	0	0	0	0	63	144	207
Golongan II/b	0	0	0	0	10	90	100
Golongan II/a	0	0	0	0	5	43	48
Jumlah Golongan II	0	0	0	0	182	459	641
Golongan I/d	0	0	0	0	0	26	26
Golongan I/c	0	0	0	0	0	18	18
Golongan I/b	0	0	0	0	0	6	6
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Golongan I	0	0	0	0	0	50	50
Jumlah seluruhnya							4868

Tabel 3. 3
Rekapitulasi Per Jenis Kelamin
PNS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020

No	Unit Organisasi	Pria	Wanita	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	70	36	106
2	Sekretariat DPRD	27	6	33
3	Sekretariat KPU	3	3	6
4	Inspektorat Kabupaten	19	23	42
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18	23	41
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17	11	28
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13	2	15
8	Badan Pendapatan Daerah	18	9	27
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	28	19	47

10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	18	15	33
11	Badan Narkotika Nasional	2	1	3
12	RSUD H. Boejasin	83	158	241
13	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	38	4	42
14	Dinas Kepemudaan dan Olah raga	11	8	19
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	11	23
16	Dinas Kesehatan	174	441	615
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	22	11	33
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	14	3	17
19	Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Perdagangan	23	4	27
20	Dinas Pariwisata	14	8	22
21	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	52	20	72
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	23	9	32
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	10	12	22
24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1017	1688	2705
25	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	17	22
26	Dinas Perhubungan	33	7	40
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16	7	23
28	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	40	19	59
29	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	29	16	45

30	Dinas Sosial	21	7	28
31	Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan	84	51	135
32	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	21	16	37
33	Kecamatan Bajuin	11	2	13
34	Kecamatan Bati-bati	17	7	24
35	Kecamatan Batu Ampar	15	1	16
36	Kecamatan Bumi Makmur	15	3	18
37	Kecamatan Jorong	12	5	17
38	Kecamatan Kintap	8	4	12
39	Kecamatan Kurau	13	5	18
40	Kecamatan Panyipatan	11	3	14
41	Kecamatan Pelaihari	26	35	16
42	Kecamatan Takisung	16	2	18
43	Kecamatan Tambang Ulang	14	3	17
44	Kelurahan Angsau	4	7	11
45	Kelurahan Karang Taruna	3	6	9
46	Kelurahan Pabahanan	3	4	7
47	Kelurahan Pelaihari	4	5	9
48	Kelurahan Sarang Halang	4	5	9
Jumlah		2151	2762	4868

Tabel 3. 4
Rekapitulasi PNS Kabupaten Tanah Laut Per Golongan
Tahun 2020

NO	UNIT ORGANISASI	Jumlah PNS Menurut Golongan/Kepangkatan																				Jumlah
		Golongan I				JLH	Golongan II				JLH	Golongan III				JLH	Golongan IV				JLH	
		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		
1	Sekretariat Daerah		1		1	2	2		13	17	32	20	7	11	19	57	4	4	6	1	15	106
2	Sekretariat DPRD			1		1	1	2	3	5	11	7	1	3	6	17	1	3			4	33
3	Sekretariat KPU				1	1			1	2	3				2	2					0	6
4	Inspektorat Kabupaten					0		1		6	7	6	3	6	10	25	6	4			10	42
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					0		1	4	10	15	5	5	6	8	24	1		1		2	41
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				1	1	1		2	3	6	2	2	1	10	15	4	1	1		6	28
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					0	1	2	1	5	9		1	1	3	5		1			1	15
8	Badan Pendapatan Daerah			1		1			1	3	4	6		6	3	15	5	1	1		7	27

9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah					0			3	10	13	10	7	5	7	29	3	1	1		5	47
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					0			2	3	5	4	5	3	9	21	4	2	1		7	33
11	Badan Narkotika Nasional					0					0		2		1	3					0	3
12	RSUD H. Boejasin			1	1	2		4	8	15	27	19	69	46	55	189	15	5	3		23	241
13	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			3		3	1		12	7	20	2	1	4	7	14	4	1			5	42
14	Dinas Kepemudaan dan Olah raga					0				2	2	3	3	3	5	14	1	1	1		3	19
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					0			2	4	6	3	4	2	6	15	1		1		2	23
16	Dinas Kesehatan					0		2	57	61	120	87	150	99	129	465	26	4			30	615
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan					0		1	2	2	5	4	4	5	6	19	5	3	1		9	33
18	Dinas Komunikasi dan Informatika					0			2	4	6	1	2	2	2	7	1	2	1		4	17

19	Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Perdagangan		1	4	1	6	2	1	2	1	6	1	1	2	6	10	3	1		1	5	27
20	Dinas Pariwisata					0	1		2	3	6	2	1	3	7	13	1	2			3	22
21	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan				1	1	2	2	9	14	27	10	11	12	8	41		2	1		3	72
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					0		1	3	9	13	4	1	2	8	15	2	1	1		4	32
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu					0			1	3	4	1	1	3	8	13	3	1	1		5	22
24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		2	3	8	13	24	59	48	47	178	245	640	440	291	1616	705	193			898	2705
25	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					0			1	3	4	1	1	1	7	10	7	1			8	22
26	Dinas Perhubungan					0		2	4	2	8	9	9	5	5	28	2	1	1		4	40

27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					0			1	1	2	2	3	1	9	15	3	2	1		6	23
28	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup		1	3	5	9	4	7	5	3	19	5	4	9	6	24	6	1			7	59
29	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				2	2			1	4	5	8	7	3	14	32	4	1	1		6	45
30	Dinas Sosial				2	2				6	6	2	4	3	4	13	4	2	1		7	28
31	Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan				1	1	3		3	5	11	23	14	20	31	88	21	14			35	135
32	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian			1		1				1	1	6	8	4	11	29	3	3			6	37
33	Kecamatan Bajuin		1			1			1	1	2	1	1		6	8	2				2	13
34	Kecamatan Bati-bati				2	2	1	1	2	2	6	1	5	1	6	13	2	1			3	24
35	Kecamatan Batu Ampar					0	1	2		1	4	2	1	1	6	10	2				2	16
36	Kecamatan Bumi Makmur					0	1	4	1	2	8	1	3	1	3	8		2			2	18
37	Kecamatan Jorong					0	1	2	2	2	7	2	2		5	9	1				1	17

38	Kecamatan Kintap					0			2	1	3		1	1	5	7	1	1			2	12
39	Kecamatan Kurau					0		2	1	3	6	2	1	2	5	10	1	1			2	18
40	Kecamatan Panyipatan					0		2		2	4	2			6	8	2				2	14
41	Kecamatan Pelaihari			1		1		1	2	6	9	9	15	6	18	48	2	1			3	16
42	Kecamatan Takisung					0	1	1	3	1	6	2	2	3	4	11	1				1	18
43	Kecamatan Tambang Ulang					0	1			4	5	1	2		7	10	2				2	17
44	Kelurahan Angsau					0			1	1	2	2	3	2	1	8	1				1	11
45	Kelurahan Karang Taruna					0		1		1	2	1	1	1	4	7					0	9
46	Kelurahan Pabahanan					0				1	1	1		1	4	6					0	7
47	Kelurahan Pelaihari			1		1			1		1		5	1	1	7					0	9
48	Kelurahan Sarang Halang					0				1	1	3	2	1	2	8					0	9
JUMLAH		0	6	19	26	51	48	101	209	290	648	528	1015	732	786	3061	862	264	25	2	1153	4868

Tabel 3. 5
Rekapitulasi PNS Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Pendidikan Formal
Tahun 2020

NO	UNIT ORGANISASI	Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan										JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	D/I	D/II	D/III	D/IV	S-1	S-2	S-3	
1	Sekretariat Daerah	2	1	28		1	11	11	41	11		106
2	Sekretariat DPRD	1	2	11			2		14	3		33
3	Sekretariat KPU	1		3					2			6
4	Inspektorat Kabupaten		1	1			6	3	23	8		42
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			6		2	12	1	18	2		41
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		2	6			4		10	6		28
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			9			2		4			15
8	Badan Pendapatan Daerah		1	3			5	1	14	3		27
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			6			17	3	19	2		47
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			4			3	1	19	6		33
11	Badan Narkotika Nasional						2		1			3
12	RSUD H. Boejasin	2	3	22	4	1	119	13	58	19		241
13	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3		20			1	1	15	2		42

14	Dinas Kepemudaan dan Olah raga			2			2	2	9	4		19
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			6			6		11			23
16	Dinas Kesehatan		1	56	14	1	369	25	123	23		614
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan			8			1	1	21	2		33
18	Dinas Komunikasi dan Informatika			3			4	1	6	3		17
19	Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Perdagangan	6	3	1			3		8	6		27
20	Dinas Pariwisata	1	1	3			4	1	10	2		22
21	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2	2	20		2	19	1	23	3		72
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		1	10			3	3	13	2		32
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu			3			2	1	14	2		22
24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7	37	252	6	397	16	2	1918	70		2706
25	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			2	1		2	2	10	5		22
26	Dinas Perhubungan			11		3	8	2	13	3		40
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			3			3		10	7		23
28	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	5	8	15		1	4	2	20	4		59
29	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		2	7		1	3	3	24	5		45

30	Dinas Sosial	2		8			1	2	10	4	1	28
31	Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1	2	16			11	20	82	3		135
32	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		1	2	1		4	1	24	4		37
33	Kecamatan Bajuin	1		2			1		7	2		13
34	Kecamatan Bati-bati	3		7			3		9	2		24
35	Kecamatan Batu Ampar			4			2		9	1		16
36	Kecamatan Bumi Makmur		2	6			2	1	5	2		18
37	Kecamatan Jorong			7			3	1	6			17
38	Kecamatan Kintap			2			1	1	8			12
39	Kecamatan Kurau		2	4	1		2		7	2		18
40	Kecamatan Panyipatan		1	2			3		6	2		14
41	Kecamatan Pelaihari			4			3		8	1		16
42	Kecamatan Takisung		1	8				1	6	2		18
43	Kecamatan Tambang Ulang		2	4			2	2	7			17
44	Kelurahan Angsau			5			2	1	3			11
45	Kelurahan Karang Taruna			3				1	5			9
46	Kelurahan Pabahanan			1			1		5			7

47	Kelurahan Pelaihari	1		3				2	3			9
48	Kelurahan Sarang Halang		1	2				1	5			9
	Jumlah	38	77	611	27	409	674	114	2686	228	1	4868

Tabel 3. 6
Rekapitulasi PNS Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Tingkat Diklat Penjenjangan
Tahun 2020

NO	UNIT ORGANISASI	Jumlah PNS Menurut Tingkat Diklat Penjenjangan					Jumlah
		Non DIKLAT	PIM IV	PIM III	PIM II	PIM I	
1	Sekretariat Daerah		25	8	4		37
2	Sekretariat DPRD		8	4			12
3	Sekretariat KPU		2				2
4	Inspektorat Kabupaten		12	4			16
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		7	1	1		9
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		10	4	1		15
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		3	1			4
8	Badan Pendapatan Daerah		10	3	1		14
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		12	3			15

10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		10	4	1		15
11	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut		1				1
12	RSUD H. Boejasin		6	4			10
13	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		9	5			14
14	Dinas Kepemudaan dan Olah raga		7	4			11
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		7	1	1		9
16	Dinas Kesehatan		47	4			51
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		10	7			17
18	Dinas Komunikasi dan Informatika		3	5			8
19	Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Perdagangan		8	2	1		11
20	Dinas Pariwisata		10	2			12
21	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		15	2	1		18
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		9	3			12
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu		13	3			16
24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		15	4			19
25	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		13	2			15
26	Dinas Perhubungan		10	4			14

27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		9	5			14
28	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup		12	6			18
29	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		17	3	1		21
30	Dinas Sosial		9	3	1		13
31	Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan		24	4			28
32	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		10	3	1		14
33	Kecamatan Bajuin		7	1			8
34	Kecamatan Bati-bati		8	1	1		10
35	Kecamatan Batu Ampar		7	2			9
36	Kecamatan Bumi Makmur		3	2			5
37	Kecamatan Jorong		5	2			7
38	Kecamatan Kintap		8				8
39	Kecamatan Kurau		7	1			8
40	Kecamatan Panyipatan		7				7
41	Kecamatan Pelaihari		7	2			9
42	Kecamatan Takisung		5	1			6
43	Kecamatan Tambang Ulang		8	1			9

44	Kelurahan Angsau		4				4
45	Kelurahan Karang Taruna		4				4
46	Kelurahan Pabahanan		5				5
47	Kelurahan Pelaihari		2				2
48	Kelurahan Sarang Halang		2				2
	Jumlah	0	452	121	15	0	588

Tabel 3. 7
Rekapitulasi PNS Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Jabatan/ Eselonering
Tahun 2020

NO	UNIT ORGANISASI	Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan													JUMLAH	
		Jafung	Non Eselon	Eselon I		JLH	Eselon II		JLH	Eselon III		JLH	Eselon IV			JLH
				A	B		A	B		A	B		A	B		
1	Sekretariat Daerah	11	56			0	1	6	7	9		9	23		23	106
2	Sekretariat DPRD		20			0		1	1	3		3	9		9	33
3	Sekretariat KPU		4			0			0	1		1	1		1	6
4	Inspektorat Kabupaten	25	10			0			0	4		4	3		3	42
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	26			0		1	1	1	2	3	8		8	41

6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	11			0		1	1	1	4	5	10		10	28
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		10			0			0	1		1	4		4	15
8	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut		2			0			0			0	1		1	3
9	Badan Pendapatan Daerah		11			0		1	1	1	3	4	11		11	27
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6	22			0		1	1	1	4	5	13		13	47
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	11			0		1	1	1	5	6	13		13	33
12	RSUD H. Boejasin	204	23			0			0	1	4	5	9		9	241
13	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		27			0			0	1	3	4	11		11	42
14	Dinas Kepemudaan dan Olah raga		7			0		1	1	1	2	3	8		8	19
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	11			0		1	1		3	3	6		6	23
16	Dinas Kesehatan	494	56			0		1	1	1	5	6	39	19	58	615
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1	16			0		1	1	1	4	5	10		10	33
18	Dinas Komunikasi dan Informatika		8			0		1	1	1	2	3	5		5	17
19	Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Perdagangan		14			0		1	1	1	3	4	8		8	27
20	Dinas Pariwisata		9			0		1	1	1	3	4	8		8	22
21	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan	1	44	1		1		1	1	1	5	6	17	2	19	72

	Ruang dan Pertanahan															
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		16			0		1	1	1	3	4	11		11	32
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu		6			0		1	1	1	4	5	10		10	22
24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2502	184			0			0	1	4	5	14		14	2705
25	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	6			0			0	1	3	4	10		10	22
26	Dinas Perhubungan	5	17			0		1	1	1	2	3	12	2	14	40
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	7			0		1	1	1	2	3	8		8	23
28	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup		36			0		1	1	1	5	6	15	1	16	59
29	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5	16			0		1	1	1	3	4	15	4	19	45
30	Dinas Sosial		16			0		1	1	1	2	3	8		8	28
31	Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan	85	20			0			0	1	4	5	14	11	25	135
32	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	9	11			0		1	1	1	3	4	11	1	12	37
33	Kecamatan Bajuin		4			0			0	1	1	2	5	2	7	13
34	Kecamatan Bati-bati	1	15			0			0	1	1	2	5	1	6	24

35	Kecamatan Batu Ampar		7			0			0	1	1	2	5	2	7	16
36	Kecamatan Bumi Makmur	1	9			0			0	1	1	2	5	1	6	18
37	Kecamatan Jorong	1	7			0			0	1	1	2	5	2	7	17
38	Kecamatan Kintap		4			0			0	1	1	2	4	2	6	12
39	Kecamatan Kurau		9			0			0	1	1	2	5	2	7	18
40	Kecamatan Panyipatan		5			0			0	1	1	2	5	2	7	14
41	Kecamatan Pelaihari		7			0			0	1	1	2	5	22	27	36
42	Kecamatan Takisung		9			0			0	1	1	2	5	2	7	18
43	Kecamatan Tambang Ulang	1	7			0			0	1	1	2	5	2	7	17
44	Kelurahan Angsau		6			0			0			0	1		1	7
45	Kelurahan Karang Taruna		4			0			0			0	1		1	5
46	Kelurahan Pabahanan		2			0			0			0	1		1	3
47	Kelurahan Pelaihari		4			0			0			0	1		1	5
48	Kelurahan Sarang Halang		4			0			0			0	1		1	5
	Jumlah	3366	836	1	0	1	1	28	29	54	98	152	404	80	484	4868

Tabel 3.8
Rekapitulasi PNS Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Batas Usia Pensiun
Tahun 2020

NO	UNIT ORGANISASI	Jumlah PNS Menurut Batas Usia Pensiun						Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Sekretariat Daerah	1	4	2	1	4	1	13
2	Sekretariat DPRD		1	1	3		2	7
3	Sekretariat KPU							0
4	Inspektorat Kabupaten	5	1	1	2	2	1	12
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				1			1
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	7	2	1	4	1	18
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			1		2		3
8	Badan Pendapatan Daerah		1	1	3	1	1	7
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			2	1	1		4
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		1	1				2
11	Badan Narkotika Nasional							0
12	RSUD H. Boejasin		5	6	4	3	4	22
13	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3	2	2	1	1		9

14	Dinas Kepemudaan dan Olah raga	2	3	1		2		8
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	1	2	2	1	2	11
16	Dinas Kesehatan	3	8	9	6	9	12	47
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2	2	2	4	1	1	12
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	1	2				5
19	Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Perdagangan	4	2	1		1	1	9
20	Dinas Pariwisata	2	1	1				4
21	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	3	3	4	2	2	4	18
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2		2		1	1	6
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu		1	2		4	2	9
24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	85	73	103	132	129	129	651
25	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2		3	3	3	3	14
26	Dinas Perhubungan	2		3	1	2		8
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	3	2	2		2	11
28	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	6	1	1	2	1		11
29	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2	1	3	3	3	2	14
30	Dinas Sosial			1	5	1	1	8

31	Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan	14	5	8	11	11	14	63
32	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2		2		4	2	10
33	Kecamatan Bajuin		1	2		1	1	5
34	Kecamatan Bati-bati		4	2	2			8
35	Kecamatan Batu Ampar			1		1	1	3
36	Kecamatan Bumi Makmur		1	1		2	1	5
37	Kecamatan Jorong	2	1	1		1	1	6
38	Kecamatan Kintap	2			3		2	7
39	Kecamatan Kurau	4	2	2	1	1	1	11
40	Kecamatan Panyipatan	1			2	1	3	7
41	Kecamatan Pelaihari	2	2	3	3	2	5	17
42	Kecamatan Takisung			1	3	2		6
43	Kecamatan Tambang Ulang	2	1	2	1	1	1	8
44	Kelurahan Angsau			1	1	1	1	4
45	Kelurahan Karang Taruna					1	1	2
46	Kelurahan Pabahanan	1	1					2
47	Kelurahan Pelaihari		1	1			1	3

48	Kelurahan Sarang Halang	1			1		1	3
	Jumlah	165	141	188	207	207	206	1114

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020

Tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan Pokok untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan dengan nilai keseluruhan pagu sebesar **Rp. 11.471.659.484,60,-** dengan serapan dana APBD sebesar **Rp. 6.610.780.409,-** atau **57,63%** dengan kondisi anggaran **SILPA** sebesar **Rp. 4.860.879.075.60,-**

Tabel 3. 9
Pagu dan Realisasi Anggaran
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
a. Belanja tidak Langsung	7.274.518.572,60	3.762.086.898	3.512.431.674,60	51,72
– Gaji dan Tunjangan	5.154.896.935,64	1.891.220.389	3.263.676.546,64	
– TPP	2.119.621.636,96	1.870.866.509	248.755.127,96	
b. Belanja Langsung	4.197.140.912	2.848.693.511	1.348.447.401	67,87
– Belanja Pegawai	7.274.518.572,60	3.762.086.898	3.512.431.674,60	
– Belanja Barang dan Jasa	4.132.666.712	2.788.323.511	1.344.343.201	
– Belanja Modal	64.474.200	60.370.000	4.104.200	
BTL + BL	11.471.659.484,60	6.610.780.409	4.860.879.075,60	57,63

Tabel 3. 10
Ringkasan dan Realisasi APBD SKPD berdasarkan program
Tahun 2020

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.617.377.832	1.412.793.091	87,35
1.	Penyediaan rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	703.462.612	638.182.035	90,72
2.	Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	566.620.160	449.922.166	79,40
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	347.295.060	324.688.890	93,49
II	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	33.588.000	19.390.000	57,73
4.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	33.588.000	19.390.000	57,73
5.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	0	0	-
III	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	20.000.000	0	-
6.	Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan	20.000.000	0	-
IV	Program Mutasi, Data dan Informasi	830.408.560	584.241.300	70,36
7.	Pembinaan, Penanganan Disiplin, dan Penghargaan ASN	35.465.600	29.741.600	83,86
8.	Penyusunan Rencana Pembinaan dan Pengembangan Karier ASN	524.443.900	334.024.300	63,69
9.	Pembangunan, Pengembangan, dan Pelayanan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	270.499.060	220.475.400	81,51
V	Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Kinerja SKPD	39.658.000	39.419.900	99,40
10.	Penyusunan perencanaan dan Kinerja SKPD	39.658.000	39.419.900	99,40
VI	Program Pembinaan, Pengembangan dan Formasi Aparatur	1.656.108.520	792.849.220	47,87
11	Pembinaan dan Pengembangan Kediklatan Aparatur	819.470.660	202.438.820	24,70
12	Pembinaan, Pengembangan Formasi, dan Pengadaan ASN	322.503.700	160.210.500	49,68
13	Pembinaan, Penjenjangan Karier,	174.784.080	131.798.200	75,41

	dan Fasilitasi Profesi Aparatur			
14	Assessment	339.350.080	298.401.700	87,93

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan (Kesesuaian antara Renstra dan Renja)

Sasaran Strategis		Rencana Kerja			Dokumen Pelaksanaan Anggaran		
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Uraian Program	Sasaran Program	Kegiatan	Uraian Program	Sasaran Program	Kegiatan
Peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial dan kompetensi teknis	Program Pembinaan, Pengembangan Formasi Aparatur	Meningkatnya Kompetensi dan Pengetahuan SDM ASN dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kediklatan Aparatur	Program Pembinaan, Pengembangan Formasi Aparatur	Meningkatnya Kompetensi dan Pengetahuan SDM ASN dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kediklatan Aparatur
				2. Pembinaan, Pengembangan Formasi, dan Fasilitasi Profesi Aparatur			2. Pembinaan, Pengembangan Formasi, dan Fasilitasi Profesi Aparatur
				3. Kegiatan Assesment			3. Kegiatan Assesment
				4. Pembinaan dan Pengembangan Formasi dan pengadaan ASN			4. Pembinaan dan Pengembangan Formasi dan pengadaan ASN
Tersedianya akurasi data kepegawaian, aparatur sipil negara yang memenuhi standard kompetensi dan meningkatnya disiplin pegawai	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	Program Mutasi, Data dan Informasi	Terbina dan Berkembangnya Aparatur Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	5. Penyusunan Rencana Pembinaan dan Pengembangan Karier ASN	Program Mutasi, Data dan Informasi	Terbina dan Berkembangnya Aparatur Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	5. Penyusunan Rencana Pembinaan dan Pengembangan Karier ASN Daerah

	Persentase pegawai yang datanya akurat			6. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan dan Pelayanan Sistem Informasi kepegawaian			6.Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan dan Pelayanan Sistem Informasi kepegawaian
		Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		7.Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan			7.Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan
	Persentase penanganan pelanggaran disiplin pegawai ASN dan Persentase penyelesaian hasil rekomendasi inspektorat			8.Kegiatan Pembinaan, Penanganan Disiplin, dan Penghargaan ASN			8.Kegiatan Pembinaan Penanganan Disiplin, dan Penghargaan ASN
Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan	Persentase terkelolanya administrasi barang / aset, perkantoran dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, serta peningkatan nilai SAKIP	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Pelayanan Administrasi di Kantor BKPSDM Kabupaten Tanah Laut	9.Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan koordinasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Pelayanan Administrasi di Kantor BKPSDM Kabupaten Tanah Laut	9.Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan koordinasi

				10. Penyediaan jasa, Bahan, Peralatan dan perlengkapan Perkantoran			10.Penyediaan jasa, Bahan, Peralatan dan perlengkapan Perkantoran
				11. Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD			11.Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD
		Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasara kerja dan Kualitas Sumber daya Manusia		12. Rehabilitasi Sedang/Berat gedung kantor			12.Rehabilitasi Sedang/Berat gedung kantor
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Kenaikan Nilai SAKIP	Program Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		13. Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD			13.Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD

7. Kondisi Sarana dan Prasarana BKPSDM

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut terletak di Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari adapun Sarana dan prasarana kerja yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut yang digunakan untuk nya adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
ASET TETAP	
- Tanah	2.567.000.000,00
- Peralatan dan Mesin	3.881.884.829.42
- Jalan,irigasi dan Jaringan	8.461.059.908.00
- Aset Tetap Lainnya	300.723.000.00
<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(5.857.549.822.42)
JUMLAH ASET TETAP	9.353.117.915.00
ASET LAINNYA	8.231.424.00
NILAI ASET BKPSDM	9.361.349.339.00

Keseluruhan asset tetap diatas dikelola oleh badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2020 dengan Kondisi Baik.

8. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan:
- Dalam Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut sebagai fungsi pelayanan, juga mengalami permasalahan dan faktor yang mempengaruhi, yakni:
- a. Pengembangan Karier Jabatan Fungsional berkaitan dengan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan belum semua dapat PNS dapat mengikuti diklat dikarenakan adanya Pemangkasan anggaran karena *Refocusing* yang mana dana di alihkan ke Penanganan Covid 19.
 - b. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan mutasi, pembinaan disiplin dan pemberhentian pegawai, dimana permasalahannya dan faktor yang mempengaruhi adalah SKPD belum maksimal

melaporkan secara tertulis keadaan yang sebenarnya mengenai kedisiplinan PNS di SKPD mereka, sehingga menyulitkan dalam pengambilan keputusan kepegawaian, serta belum optimalnya transfer informasi perkembangan regulasi dan administrasi kepegawaian ke PNS yang bertugas di wilayah kecamatan.

- c. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mempunyai isu permasalahan belum optimalnya pemanfaatan alumni diklat dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan daerah dan belum terencananya secara komprehensif akan diklat dan bimbingan teknis PNS. Hal ini dipengaruhi oleh belum terevaluasinya akan pemanfaatan alumni diklat / bimtek serta belum adanya dokumen rancangan kebutuhan diklat / bimtek dalam suatu masa tertentu.

➤ Solusi untuk Peningkatan Kinerja BKPSDM

- a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi kepegawaian yang mengacu pada hasil survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- b. Adanya suatu Indikator Kunci yang mengukur Profesionalisme ASN yang diterbitkan oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara) yaitu Indek Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (IP ASN), BKPSDM mulai melakukan finalisasi data pengukuran indeks profesionalitas ASN Tahun 2019 sebanyak 4850 orang update data SAPK, IP ASN ini memuat 4 (empat) Variabel yaitu, Nilai Kompetensi, Nilai Kinerja, Kompensasi dan tingkat Kedisiplinan yang mana tujuan yang diperoleh dari IP ASN ini yaitu
 1. Tersedianya indikator kualitas PNS yang lebih terukur, memiliki kredibilitas dan reliabilitas ketersediaan data.
 2. Mengetahui proxy tingkat pencapaian profesionalitas di sebuah organisasi untuk memberi ukuran yang lebih jelas dalam upaya perbaikan kualitas ASN.
 3. Sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan perencanaan pengembangan profesional ASN dalam sebuah organisasi dimasa yang akan datang.
- c. Peningkatan kualitas Kedisiplinan yang didukung *reward* dan *punishment* akan semakin dipeketat.
- d. Peningkatan Kualitas Pengelolaan arsip secara elektronik serta Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi.

- e. Dalam pelayanan peningkatan Kompetensi teknis dan Manejerial kedepannya BKPSDM akan memperhatikan Diklat yang sifatnya Tekhnis substantif dengan Kurikulum yang baru dan metode kerja terbaru.
- f. Peningkatan pola pikir positif dan Motivasi berkinerja akan terus dilakukan secara berkesinambungan, metode monitoring, konseling, dan pendampingan penilaian kinerja menjadi suatu keharusan guna mewujudkan aparatur yang Profesional dan berintegritas tinggi.

B. Indikator Kinerja Kunci

Tabel 3. 11
Indikator Kinerja Kunci BKPSDM

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
		1 1	Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) 167 orang ----- X 100% Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 1.667 orang	10.02%	
		1.2	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi 0 orang ----- X 100% Seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	0%	

BAB IV

REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

Tabel 4. 1

Tabel Target dan Capaian Kinerja BKPSDM Tahun 2020

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA	ANGGARAN 2020 (Rp.)	REALISASI			
					FISIK/ KINERJA	%	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)	8	9=(8/5)
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1.617.377.832		100%	1.412.793.091	87,35%
1	Penyediaan Rapat – Rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Jumlah Orang	12 Bulan	703.462.612	12 Bulan	100%	638.182.035	90,72%
2	Penyediaan Jasa, Bahan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis	8 Jenis	566.620.160	12 Jenis	100%	449.922.166	72,40%
3	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	Jumlah Orang	15 Orang	39.804.800	15 Orang	100%	324.688.890	93,49%
II	PEMENUHAN, PENINGKATAN SARANA / PRASARANA KERJA DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			33.588.000		100%	19.390.000	57,73%

4	Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor	Jumlah Gedung	7 Gedung	33.588.000	7 Gedung	100%	19.390.000	57,73%
5.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Jenis	0 Jenis	-	-	-	-	-
III	PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			20.000.000		0%		0%
6.	Pelaksanaan Kegiatan Pamera Pembangunan	Jumlah Event	2 event	20.000.000	0 Event	-	-	0%
IV	MUTASI DATA DAN INFORMASI			830.408.560		101,55%	584.241.300	70,36%
7.	Pembinaan, Penanganan Disiplin, dan Penghargaan ASN	Jumlah Dokumen	120 Dokumen	35.465.600	120 Dokumen	100%	29.741.600	83,86%
8.	Penyusunan Rencana Pembinaan dan Pengembangan Karier ASN	Jumlah Orang	2000 Orang	524.443.900	2093 Orang	104,65%	334.024.300	63,69%
9.	Pembangunan, Pengembangan dan Pelayanan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	270.499.060	5 Dokumen	100%	220.475.400	81,51%
V	PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA SKPD			39.658.000		100%	39.419.900	99,40%
10.	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Jumlah Laporan	8 Laporan	39.658.000	8 Dokumen	100%	39.419.900	99,40%

VI	PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN FORMASI APARATUR							
11.	Pembinaan dan Pengembangan Kediklatan Aparatur	Jumlah Orang	76 Orang	819.470.660	40 Orang	52,63%	202.438.820	24,70%
12.	Pembinaan, Pengembangan Formasi dan Pengadaan ASN	Jumlah Orang	250 Orang	322.503.700	0 Orang	0%	160.210.500	49,68%
13.	Pembinaan, Penjenjangan Karier, dan Fasilitasi Profesi Aparatur	Jumlah Orang	63 Orang	174.784.080	55 Orang	87,30%	131.798.200	75,41%
14.	Kegiatan Assessment	Jumlah Orang	44 Orang	339.350.080	42 Orang	95,45%	298.401.700	87,93%
	JUMLAH			4.197.140.912		92.08%	2.848.693.511	67,87%

BAB V

TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan yang diterima

Tidak ada

B. Tugas Pembantuan yang di Berikan

Tidak ada

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Kabupaten Tanah Laut Tidak Melaksanakan Tugas Pembantuan.

BAB VI

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama dengan Mitra Kerja

- Mitra yang diajak Kerjasama:
 1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementrian Dalam Negeri
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (BKPSDMD) provinsi
 3. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
 4. Politekhnik Kabupaten Tanah Laut

- Bidang Kerjasama:
 1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Latihan Dasar CPNS dan Pendidikan dan Pelatihan Tingkat IV (PIM IV)
 2. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
 3. Pelaksanaan uji Kompetensi maupun test Psikologis bagi pejabat Struktural Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
 4. Pelaksanaan Penerimaan CPNS

- Nama Kegiatan:
 1. Kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural
 2. Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
 3. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
 4. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS
 5. Kegiatan Penyelenggaraan tes wawancara Pengembangan Karier Pegawai, penyertaan ujian dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
 6. Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

➤ **Pelaksanaan Kegiatan Pola Kerjasama Tahun 2019**

I. Pelaksanaan Pendidikan Kompetensi

Uraian	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta Yang Lulus
Diklat Peningkatan Kompetensi Manajerial	169	169
• Latsar CASN Gol. II	40	40
• Latsar CASN Gol III	120	120
• Penyertaan Latsar CASN Gol. III	9	9
Diklat Peningkatan Kompetensi Teknis	52	52
• Diklat PIM II	3	3
• Diklat PIM III	9	9
• Diklat PIM IV	40	40

II. PELAKSANAAN UJIAN DINAS

No.	Ujian Dinas	Jumlah Peserta	Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Ket.
1	Ujian Dinas Tingkat I	6 orang	30 Januari 2019	BKD Prov. Kalsel	Lulus semua
2	Ujian Dinas Tingkat II	2 orang	31 Januari 2019	BKD Prov. Kalsel	Lulus semua
Total peserta		8 orang			

III. PELAKSANAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH (UKPPI)

No.	Pendidikan yang disesuaikan	Jumlah Peserta	Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Ket.
1	S1	14 orang	26 Juni 2019	BKD Prov. Kalsel	Lulus semua
2	SLTA	1 orang	26 Juni 2019	BKD Prov. Kalsel	Lulus semua
Total peserta		15 orang			

IV. Pelaksanaan Tugas Belajar

No.	Tugas Belajar	Jumlah PNS Tugas Belajar	Ket
1	Dokter Spesialis	2 orang	Biaya Pemkab Tanah Laut
2	S2	1 orang	Biaya RSIA Ibunda
3	S1 dan Profesi	1 orang	Biaya Kemenkes RI
Jumlah		4 orang	

V. Pelaksanaan izin belajar

No.	Izin Belajar	Jumlah PNS Izin Belajar	Ket
1	S2	10 orang	
2	S1	21 orang	
3	D4	1 orang	
4	D3	36 orang	
Jumlah		68 orang	

VI. Pelaksanaan Pencantuman Gelar

No.	Pencantuman Gelar	Jumlah PNS Pencantuman Gelar	Ket
1	S2	12 orang	
2	S1 dan Profesi	1 orang	
3	S1	24 orang	
4	Profesi	1 orang	
5	D3	24 orang	
6	Paket C	5 orang	
7	Paket B	2 orang	
Jumlah		69 orang	

VII. Pelaksanaan Assesment

No.	Asesmen	Jumlah Peserta			Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Ket.
		JPT	Administrator	Pengawas			
1	Talent Pool	5 orang	14 orang		25 s.d 27 Juni 2019	BKN Kanreg VIII Banjarmasin	BKN
2	Asesmen bagi pelamar seleksi pengisian 7 (tujuh) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama		38 orang		12 s.d 14 Agustus 2019	Hotel Novotel Banjarbaru	Kerja sama dengan Unit Koordinasi Pelayanan Psikologi Unlam
3	Asesmen bagi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah	4 orang			19 Desember 2019	Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru	Kerja sama dengan Unit Koordinasi Pelayanan Psikologi Unlam
4	Asesmen bagi calon Pejabat Administrator			16 orang	20 Desember 2019	Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru	Kerja sama dengan Unit Koordinasi Pelayanan Psikologi Unlam
Total peserta		9 orang	52 orang	16 orang			

➤ Sumber dan Jumlah Anggaran dan Realisasi

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
I	Program Pendidikan Kedinasan		3.996.718.400	2.464.540.408	61.66%
		2. Pendidikan penjenjangan struktural	3.816.718.400	2.364.095.408	61.94%
		3. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	180.000.000	100.445.000	55.80%
II	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		2.459.220.350	1.622.193.275	65.96%
		1. Seleksi penerimaan CPNS	430.306.200	127.306.900	29.59%
		2. Pemberian bantuan tugas belajar, ijin belajar, dan ikatan dinas	1.631.891.100	1.147.981.700	70.35%
		3. Penyusunan formasi PNS	17.048.100	5.540.400	32.50%
		4. Penyelenggaraan tes kemampuan pengembangan karier PNS, penyertaan ujian dinas, dan ujian penyesuaian ijasah	379.974.950	341.364.275	89.84%
	J U M L A H		6.455.938.750	4.086.733.683	63.30%

BAB VII

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDART PELAYANAN MINIMAL (SPM)

a. Tingkat Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM)

1. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara
2. Tersedianya aparatur sipil negara yang memenuhi standard kompetensi
3. Meningkatnya pemenuhan hak - hak kepegawaian ASN
4. Meningkatnya disiplin pegawai ASN
5. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
6. Tersedianya akurasi data kepegawaian

b. jenis produk pelayanan antara lain:

1. Menyusun formasi tentang kebutuhan PNS di Kabupaten Tanah Laut
2. Pembuatan SK Kenaikan Gaji Berkala, SK Kepangkatan dan Penggajian, SK Mutasi, dan SK Pensiun
3. Data SIMPEG
4. Membuat Kartu Pegawai, TASPEN, dan TAPERUM
5. Pelaksanaan / penyertaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prajabatan
6. Pelaksanaan / penyertaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Struktural
7. Pelaksanaan / penyertaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Teknis / Fungsional
8. Pelaksanaan PNS Tugas Belajar, SK Ijin Belajar, dan Ikatan Dinas
9. Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNSD

Tabel 7. 1
Pencapaian Pelayanan sesuai dengan Tugas dan Fungsi

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -		Rasio Capaian pada Tahun Ke-	
					2018	2019	2021	2022	2023	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	17
1	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi : - Kompetensi manajerial - Kompetensi teknis	-	-	-	94,74 56,49	96,16 60,67	97,58 64,85	99 69,04	100 73,22	100 80	84,03 51,11	105,55 141,62	87,39 84,24
2	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	-	-	-	100	100	100	100	100	94,73	94,99	94,73	94,99
3	Persentase penanganan pelanggaran disiplin pegawai ASN	-	-	-	100	100	100	100	100	75	115	75	115
4	Persentase penyelesaian hasil rekomendasi inspektorat	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase tingkat kehadiran pegawai BKPSDM	-	-	-	100	100	100	100	100	94	95	94	95
6	Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100

7	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian				BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	100	100
8	Persentase pegawai yang datanya akurat				100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase terkelolanya administrasi barang / aset, perkantoran dan kepegawaian				100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase terkelolanya administrasi perencanaan dan keuangan				100	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja BKPSDM Kabupaten Tanah Laut

Tabel 8. 1

Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Keterangan
1	Peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara	1	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi Manajerial dan Kompetensi Tekhnis	100%	Kegiatan yang mendukung indikator ini berupa Diklatsar, Diklat PIM dan Teknis dan Diklat Fungsional
2	Tersedianya aparatur sipil negara yang memenuhi standard kompetensi	1	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	100%	Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah dengan Melaksanakan Fasilitasi Mutasi dan Promosi Jabatan ASN dan memfasilitasi Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat ASN
3	Menigkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian	1	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Baik	Kegiatan yang mendukung Indikator ini dengan survey IKM dalam melaksanakan Kegiatan Pelayanan kepegawaian

B. Capaian Target Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja

Tabel 8. 2
Capaian Target dan Kinerja Tahun 2020

NO	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
I.	Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sipil Negara				
1.	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi :	%	100	79,22	79,22
	- Kompetensi manajerial	%	100	84,03	
	- Kompetensi Tekhnis	%	100	51,11	
II.	Sasaran Strategis 2 : Tersedianya aparatur sipil negara yang memenuhi standard kompetensi				
2.	Persentase jabatan yang di isi sesuai dengan Kompetensi	%	100	94,99	94,99
III.	Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian				
3	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi	Indeks	Baik	Baik	100
	- Nilai rata- rata unsur			28.935	
	- Nilai rata-rata tertimbang			3.183	
	- Nilai IKM			79.57	
Nilai rata rata capaian					91,40

C. Perbandingan Capaian Kinerja 2019 terhadap capaian 2018

Tabel 8. 3
Perbandingan Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Utama	2018			2019		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi:	100%	97.92%	97.92%	100%	79.22%	79.22
1. Kompetensi manajerial	100%	100%		100%	84.03%	
2. Kompetensi teknis	100%	80%		100%	51.11%	
Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	703	666	95.28%	699	664	94.99%
Tingkat kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian				Baik	Baik	100%

D. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan Target dalam RPJMD Tahun 2018 – 2023

Tabel 8. 4
Perbandingan Capaian Kinerja terhadap RPJMD 2018 - 2023

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target		Realisasi		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi:						
	- Kompetensi manajerial	94,74	94,74	96,16	100%	84.03%	100
	- Kompetensi teknis	56,49	56,49	60,67	80%	51.11%	73,22
2	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	100	100	100	95.28%	94.99%	100
3	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	BAIK		BAIK		BAIK	BAIK

E. Analisis efisiensi dalam Pencapaian Kinerja

Efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu, semakin tinggi sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu maka efisiensinya akan semakin rendah, sebaliknya pun begitu semakin rendah semua sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran maka efisiensi anggaran semakin tinggi.

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019 Menunjukkan efisiensi yang cukup tinggi, upaya efisiensi sumber daya dilakukan dengan Penggunaan Pengembangan sistem Kepegawaian melalui aplikasi yang dapat meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian:

- Simpeg (Sistem Informasi Kepegawaian);
- E-SKP;
- Sidika (Sistem Informasi Dokumentasi Kepegawaian);
- Silka (Sistem Informasi Layanan Kepegawaian);
- Sinovda (Sistem Informasi Inovasi Daerah);
- dan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian).

F. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target dan Kinerja

Tabel 8. 5
Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target dan Kinerja
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Program		Kegiatan
1	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	I	Pendidikan Kedinasan	1. Pendidikan Penjurusan Struktural
				2. Peningkatan keterampilan dan Profesionalisme
		II	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3. Seleksi Penerimaan CPNS
				4. Pemberian Bantuan Tugas Belajar, ijin Belajar dan Ikatan Dinas
				5. Penyusunan Formasi PNS
				6. Penyelenggaraan Tes Kemampuan Pengembangan Karier PNS, Penyertaan ujian dinas dan Penyesuaian Ijazah
2.	Tersedianya Aparatur			7. Penyusunan rencana Pembinaan Karier PNS

	Sipil Negara yang memenuhi Standart Kompetensi			8. Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
				9. Penanganan Kasus – Kasus Pelanggaran Disiplin
		III	Peningkatan Kapasitas dan sumber daya Aparatur	10. Workshop/kursus singkat untuk PNS
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian	IV	Pelayanan Administrasi perkantoran	11. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan Listrik
				12. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional
				13. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
				14. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
				15. Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
				16. Penyediaan Alat Tulis Kantor
				17. Penyediaan Barang cetakan dan pengadaan
				18. Penyediaan Komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
				19. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
				20. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang - undangan
				21. Penyediaan Makanan dan Minuman
				22. Rapat-rapat Konsultasi dan koordinasi keluar daerah
				23. Peningkatan manajemen aset/barang daerah pada SKPD
				24. Penyusunan administrasi pengelolaan kepegawaian
				25. Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD
		V	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	26. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

BAB IX

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut yang telah dijabarkan diatas didalamnya mengandung muatan Gambaran Umum SKPD, Arah Kebijakan Umum SKPD, Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkruen, Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun Anggaran 2019 mengelola kegiatan belanja Langsung sebanyak dengan 5 (lima) Program dan 26 (dua puluh enam) Kegiatan dengan nilai keseluruhan pagu sebesar **Rp. 20.693.677.650,-** dengan serapan dana APBD sebesar **Rp. 13.464.812.234,-** atau **65,07%** dan Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata realisasi kinerja Tahun 2019 sebesar **87,56 %** atau nilai realisasi Kinerja tahun ini berada pada kriteria **“Tinggi”** lebih tingginya capaian kinerja dari pada persentase penyerapan dana merupakan penghematan anggaran dimana target dari kegiatan di semua indikator telah tercapai atau memenuhi target.

Strategi yang perlu diperlukan guna meningkatkan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut dimasa mendatang antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi kepegawaian yang mengacu pada hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
2. Adanya suatu Indikator Kunci yang mengukur Profesionalisme ASN yang diterbitkan oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara) yaitu Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (IP ASN), BKPSDM mulai melakukan finalisasi data pengukuran indeks profesionalitas ASN Tahun 2019 sebanyak 4850 orang update data SAPK, IP ASN ini memuat 4 (empat) Variabel yaitu, Nilai Kompetensi, Nilai Kinerja, Kompensasi dan tingkat Kedisiplinan yang mana tujuan yang diperoleh dari IP ASN ini yaitu :
 - a. Tersedianya indikator kualitas PNS yang lebih terukur, memiliki kredibilitas dan reliabilitas ketersediaan data.
 - b. Mengetahui proxy tingkat pencapaian profesionalitas di sebuah organisasi untuk memberi ukuran yang lebih jelas dalam upaya perbaikan kualitas ASN.
 - c. Sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan perencanaan pengembangan profesional ASN dalam sebuah organisasi dimasa yang akan datang.

3. Peningkatan kualitas Kedisiplinan yang didukung *reward* dan *punishment* akan semakin dipeketat.
4. Peningkatan Kualitas Pengelolaan arsip secara elektronik serta Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi.
5. Dalam pelayanan peningkatan Kompetensi teknis dan Manejerial kedepannya BKPSDM akan memperhatikan Diklat yang sifatnya Teknis substantif dengan Kurikulum yang baru dan metode kerja terbaru.
6. Peningkatan pola pikir positif dan Motivasi berkinerja akan terus dilakukan secara berkesinambungan, metode monitoring, konseling, dan pendampingan penilaian kinerja menjadi suatu keharusan guna mewujudkan aparatur yang Profesional dan berintegritas tinggi

B. Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan

1. Nama Prestasi	:	Unit kerja pelayanan berpredikat WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
Nama yang berprestasi	:	BKPSDM Kabupaten Tanah Laut
Instansi Penyelenggara	:	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam menyusun laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan/program kedepan

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 ini kami buat untuk bahan selanjutnya

Pelaihari, Januari 2020

**Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut,**



**H. HAIRUL RIJAL, S.Sos, M.Si
NIP. 19700217 199009 1 001**